

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. A. Yani 152 C, Telp/Fax (031) 8292591 SURABAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	54
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	59
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	62
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	70
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	77
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	77
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	80
3.3. Program dan Kegiatan.....	83
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	90
BAB V. PENUTUP	99



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Bab V Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen Rencana Kerja yang terdiri dari:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah;
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. Badan Penghubung Daerah Provinsi;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun;
- l. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro;
- m. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang;
- n. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan;
- o. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember;
- p. Dinas Pendidikan;
- q. Dinas Kesehatan;
- r. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;

- s. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
- t. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- u. Dinas Sosial;
- v. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- w. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
- x. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- y. Dinas Lingkungan Hidup;
- z. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- aa. Dinas Perhubungan;
- bb. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- cc. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- dd. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- ee. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- ff. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- gg. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- hh. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ii. Dinas Perkebunan;
- jj. Dinas Peternakan;
- kk. Dinas Kehutanan;
- ll. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
- mm. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- nn. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- oo. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial;
- pp. Biro Hukum;
- qq. Biro Administrasi Perekonomian;
- rr. Biro Administrasi Sumber Daya Alam;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan;
- tt. Biro Organisasi;
- uu. Biro Umum;
- vv. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- ww. Sekretariat DPRD;
- xx. Satuan Polisi Pamong Praja;
- yy. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
- zz. Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang;
- aaa. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
- bbb. Rumah Sakit Haji Surabaya; dan
- ccc. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Juli 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Juli 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 40 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 merupakan dokumen Rencana Kerja pada:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah;
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. Badan Penghubung Daerah Provinsi;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun;
- l. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro;
- m. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang;
- n. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan;
- o. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember;
- p. Dinas Pendidikan;
- q. Dinas Kesehatan;
- r. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- s. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
- t. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- u. Dinas Sosial;
- v. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- w. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
- x. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- y. Dinas Lingkungan Hidup;
- z. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- aa. Dinas Perhubungan;
- bb. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- cc. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- dd. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- ee. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- ff. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- gg. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- hh. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ii. Dinas Perkebunan;
- jj. Dinas Peternakan;
- kk. Dinas Kehutanan;
- ll. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
- mm. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- nn. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- oo. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial;
- pp. Biro Hukum;
- qq. Biro Administrasi Perekonomian;
- rr. Biro Administrasi Sumber Daya Alam;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan;
- tt. Biro Organisasi;
- uu. Biro Umum;
- vv. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- ww. Sekretariat DPRD;
- xx. Satuan Polisi Pamong Praja;
- yy. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
- zz. Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang;
- aaa. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
- bbb. Rumah Sakit Haji Surabaya; dan
- ccc. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah bersangkutan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, perangkat daerah sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja).

Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja perangkat daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja perangkat daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja perangkat daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja perangkat daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Renja perangkat daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan perangkat daerah, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 telah menetapkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu ***Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong***, sedangkan Misi Pembangunan di Jawa Timur yaitu :

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;

3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, Partisipatoris memperkuat demokrasi kebangsaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan;
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Rencana strategis Dinas PMD Provinsi Jawa Timur merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Renja Dinas PMD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, khususnya Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan

- untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomr 1, Seri E);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Sen C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63)
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
17. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 186 Tahun 2019, tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.
18. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 187 Tahun 2019, tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai Panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program – program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu – isu strategis pada tahun 2020.

Sedangkan untuk Tujuannya adalah :

- a. Renja menjadi acuan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
- b. Renja sebagai dokumen yang berisikan Program – program dan kegiatan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Renstra dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada Renstra Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan;
2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan pemerintahan desa.

Sedangkan Sasaran Jangka Menengah yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan;
2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif;
3. Meningkatnya kemandirian pengelolaan pemerintahan desa;

Untuk mengukur kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai masing – masing sasaran strategis organisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.1. IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan	1. Jumlah UEM yang berdaya
2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	2. Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kel. yang aktif

3 Meningkatkan kemandirian pengelolaan pemerintahan desa	3. Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur
--	---

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 diwujudkan melalui pelaksanaan 8 program dan 37 kegiatan. Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018 sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur DPA APBD Provinsi Jawa Timur Nomor : 914/140/203.2/2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 82.984.170.000,- terdiri untuk :

- a) Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) Rp. 12.616.809.000,-
- b) Belanja Langsung Rp. 70.367.361.000,-

Pada P-APBD Tahun 2018 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPPA – SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada PAPBD Tahun Anggaran 2018 Nomor : 914/178.P/203.2/2018 tanggal 9 Oktober 2018 alokasi anggaran PAPBD TA 2018 menjadi sebesar Rp. 82.190.653.000,- adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1. Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) Rp. 11.553.292.000,-
- 2. Belanja Langsung Rp. 70.637.361.000,-
(Belanja ex Rutin Rp. 13.184.468.000,- dan Belanja Pembangunan Rp. 57.452.893.000,-)

Alokasi Belanja Langsung dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan 8 program sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.849.649.000,00
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 6.503.431.000,00
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Rp. 1.745.230.000,00

4.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	3.086.158.000,00
5.	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan	Rp.	40.192.727.422,00
6.	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Rp.	6.995.759.620,00
7.	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	Rp.	6.509.561.758,00
8.	Program Peningkatan kerjasama desa	Rp.	3.754.844.200,00
		Rp.	<u>70.637.361.000,00</u>

Sampai dengan Bulan Desember akhir Tahun 2018 realisasi anggaran setelah PAPBD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur alokasi sebesar Rp. 82.190.653.000,- (untuk Belanja Tidak Langsung/gaji dan Belanja Langsung), telah terealisasi sebesar Rp. 76.995.531.603,- (93,68 %), sehingga terdapat sisa anggaran sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 5.195.121.397,- (6,32 %) yang merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selengkapnya realisasi anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.2. Realisasi Anggaran Tahun 2018

NO.	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN S/D PAPBD TA 2018 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	Belanja Pegawai	11.553.292.000,-	10.809.570.095,-	93,56
B.	BELANJA LANGSUNG			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.849.649.000,-	1.821.587.271,-	98,48
2.	Program Peningkatan Sarana	6.503.431.000,-	6.056.032.636,-	93,12

	dan Prasarana Aparatur			
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1.745.230.000,-	1.689.128.501,-	96,78
4.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	3.086.158.000,-	3.012.044.280,-	97,60
5.	Program Peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan	40.192.727.422,-	37.213.908.700,-	92,59
6.	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	6.995.759.620,-	6.597.754.683,-	94,31
7.	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	6.509.561.758,-	6.213.533.748,-	95,45
8.	Program Peningkatan kerjasama desa	3.754.844.200,-	3.581.971.689,-	95,40
	JUMLAH SELURUHNYA	82.190.653.000	76.995.531.603	93,68

CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2018

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukurannya, Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018

Sasaran Strategis 1			
Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah UEM yang berdaya	34.455	36.536	106,04 %
Sasaran Strategis 2			
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Yang aktif			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kel. yg aktif	6,6 %	20,25 %	306,82 %
Sasaran Strategis 3			
Meningkatnya kemandirian pengelolaan pemerintahan desa			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur	6 %	6 %	100 %

Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas, rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 170,95 %.

Sasaran Strategis 1 :

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1.

Sasaran Strategis 1			
Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah UEM yang berdaya	34.455	36.536	106,04 %

Berdasarkan Tabel diatas, kinerja Sasaran 1 diukur dengan indikator sasaran yaitu Jumlah UEM yang berdaya. UEM yang berdaya adalah usaha ekonomi masyarakat baik itu yang baru atau yang sudah berjalan yang telah difasilitasi/dibantu/diberdayakan sehingga dapat tumbuh atau berkembang. Pencapaian kinerja indikator sasaran Jumlah

UEM yang berdaya dari target sebesar 34.455 terealisasi sebesar 36.536 atau tingkat pencapaian sebesar 106,04 %.

Capaian kinerja Sasaran 1 yang telah disempurnakan pada tahun 2018, merupakan Capaian jangka menengah pada tahun keempat dan apabila dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 untuk indikator sasaran 1 yaitu Jumlah UEM yang berdaya dari target RPJMD/Renstra 2014 – 2019 sebesar 120.171 UEM telah tercapai pada Tahun keempat sebesar 122.088 UEM atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 101,6 %, tingkat pencapaian kemajuan cukup pesat karena pada sasaran ini terdapat prioritas kegiatan yang pencapaiannya ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2018 (tahun ke 4 RPJMD) selengkapya sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2.5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 s/d Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis 1			
Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan			
Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Jumlah UEM yang berdaya	120.171	122.088	101,6 %

Pencapaian kinerja Sasaran strategis 1 yaitu Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan, secara operasional diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, dengan kegiatan Pemberdayaan Pasar Desa, Pemberdayaan BUMDesa, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat, Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan, Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin, Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal.

Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan didukung alokasi anggaran melalui APBD Provinsi Jawa Timur Tahun

2018 sebesar Rp. 40.192.727.422,-. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp. 37.213.908.700,- atau 92,59 %.

Realisasi Kinerja sasaran 1 Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan sebesar 106,04 % dengan realisasi anggaran Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan sebesar Rp. 92,59 %, sisa lebih penggunaan anggaran merupakan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan. Prosentase capaian kinerja sasaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan prosentase realisasi anggaran, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas pencapaian kinerja sasaran 1 sebesar 13,45 %, adapun efisiensi penggunaan sumberdaya selengkapnya sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1			
Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan			
Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
Jumlah UEM yang berdaya	106,04 %	92,59 %	13,45 %

Sasaran Strategis 2

Sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif diukur dengan indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif. Lembaga Kemasyarakatan desa/kel yang aktif adalah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (LPMD/K dan TP PKK) yang sesuai struktur dan siap melayani masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa. Pencapaian indikator kinerja Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif tahun 2018 dari target sebesar 6,6 %, terealisasi sebesar 20,25 % atau tingkat pencapaian sebesar 306,82 %. Pencapaian kinerja ini melampaui target kinerja, hal ini didukung oleh pembinaan dan bimbingan secara intens dari Dinas PMD Prov. Jatim dan Kabupaten/Kota melalui LPMD/LPMK di desa/kelurahan dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain yang

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan untuk kemajuan desa.

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2			
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel yang aktif			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	6,6 %	20,25 %	306,82 %

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun keempat apabila dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 untuk indikator sasaran 2 yaitu Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif dari target RPJMD/Renstra 2014 – 2019 sebesar 17,35 %, telah tercapai pada Tahun ketiga sebesar 25,34 %, atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 146,05 %, selengkapnya sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.8. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis 2			
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif			
Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	17,35%	25,34 %	146,05 %

Pencapaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif, secara operasional diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dengan kegiatan : Pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pelestarian dan Pemberdayaan

adat istiadat, Penguatan kapasitas lembaga adat, Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Pemberdayaan forum/asosiasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Jawa Timur.

Alokasi program ini pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2018 adalah sebesar Rp 6.995.759.620,-. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp. 6.597.754.683,- atau 94,31 %, selengkapnya pencapaian kinerja dan realisasi anggaran untuk Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan adalah sebagaimana dibawah ini :

Tabel. 2.9. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2						
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif						
Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kel. yang aktif	6,6 %	20,25 %	306,82 %	6.995.759.620	6.597.754.683	94,31 %
Program 2. Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan				6.995.759.620	6.597.754.683	94,31 %

Realisasi kinerja sasaran 2 Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif sebesar 306,82 %, dengan realisasi anggaran Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sebesar 94,31 %. Persentase capaian kinerja lebih tinggi apabila dibandingkan persentase realisasi anggaran, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas pencapaian kinerja sasaran sebesar 212,51 %, selengkapnya sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 2.10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2			
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif			
Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kel. yang aktif	306,82 %	94,31 %	212,51 %

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kemandirian pengelolaan pemerintahan desa. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur. Indikator ini merupakan ukuran Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, Desa Cepat Berkembang menurut Permendagri dimaksud adalah desa yang dikategorikan efektif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dengan indikator sebagaimana dicantumkan dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015.

Data pencapaian kinerja sasaran 3 sebagaimana Tabel dibawah ini, Capaian kinerja indikator Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur pada tahun 2018, dari target 6 % tercapai 6 % atau tingkat pencapaian sebesar 6 %. Hal ini didukung pembinaan intens dari Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja profil desa/kelurahan untuk melakukan update pengukuran tingkat perkembangan desa.

Tabel. 2.11. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Startegis 3			
Meningkatnya Kemandirian pengelolaan pemerintahan desa			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur	6 %	6 %	100 %

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun keempat apabila dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 untuk indikator sasaran 3 yaitu Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur dari target RPJMD/Renstra 2014 – 2019 sebesar 19 %, telah tercapai pada Tahun keempat RPJMD sebesar 6 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 61,6 %, selengkapnya sebagaimana Tabel III.berikut :

Tabel. 2.12. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 s/d Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis 3			
Meningkatnya Kemandirian pengelolaan pemerintahan desa			
Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur	19 %	11,7 %	61,6 %

Pencapaian kinerja sasaran strategis 3 secara operasional diwujudkan melalui pelaksanaan 2 Program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dengan kegiatan : Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa, Evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa, Pembinaan perencanaan pembangunan desa, Pendataan dan Pendayagunaan profil desa/kelurahan, Evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan, Pembinaan Pengelolaan Administrasi pemerintahan desa, Pembinaan penataan aset desa, Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Program Peningkatan kerjasama desa dengan kegiatan : Pemberdayaan sumberdaya lokal berbasis kawasan perdesaan, Pembangunan potensi kawasan perdesaan, Pembinaan pendayagunaan sarana perdesaan, Pemberdayaan kualitas prasarana perdesaan, Pendayagunaan TTG, Inovasi TTG.

Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa pada tahun 2018 memperoleh alokasi APBD sebesar Rp. 6.509.561.758,- telah terealisasi sebesar Rp. 6.213.533.748,- atau 95,45 %, sedangkan untuk Program Peningkatan kerjasama desa pada tahun 2018 memperoleh alokasi APBD sebesar Rp. 3.754.844.200,-. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 dari alokasi tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 3.581.971.689,- atau 95,40 %. selengkapnya pencapaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel. 2.13. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3						
Meningkatnya Kemandirian pengelolaan pemerintahan desa						
Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur	6 %	6 %	100 %	10.264.405.958	9.795.505.437	95,43 %
Program 3. Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa				6.509.561.758	6.213.533.748	95,45 %
Program 4. Program Peningkatan kerjasama desa				3.754.844.200	3.581.971.689	95,40

Realisasi kinerja sasaran 3 Meningkatkan Kemandirian pengelolaan pemerintahan desa dengan indikator persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur adalah sebesar 100 % dengan realisasi anggaran Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa serta Program Peningkatan kerjasama desa, realisasi anggaran sebesar 95,43 %. Persentase capaian kinerja lebih tinggi apabila dibandingkan persentase realisasi anggaran, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas pencapaian kinerja sasaran sebesar 4,57 %, selengkapnya sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 2.14. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3			
Meningkatnya Kemandirian pengelolaan pemerintahan desa			
Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur	100 %	95,43 %	4,57 %

CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2018

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan melalui 4 (empat) program pembangunan yaitu (i) Program Peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan, (ii) Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, (iii) Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa (iv) Program Peningkatan kerjasama desa. Adapun capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan dengan indikator program (i) Jumlah lembaga ekonomi desa yang terbentuk dengan target

200 lembaga dan telah terealisasi sebesar 212 lembaga atau tingkat pencapaian sebesar 106 % dan (ii) Jumlah RTS yang memiliki usaha dengan target 33.773 RTS dan telah terealisasi sebanyak 36.324 RTS atau tingkat pencapaian sebesar 107,55 %. Alokasi anggaran sebesar Rp. 40.192.727.422,- telah terealisasi sebesar Rp. 37.213.908.700,- (92,59%). Program ini didukung oleh pelaksanaan 8 kegiatan yaitu :

- a. Pemberdayaan Pasar Desa
 - b. Pemberdayaan BUMDesa
 - c. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - d. Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan
 - e. Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (JM BRTSM)
 - g. Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal
2. Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dengan indikator kinerja program (1) Persentase lembaga kemasyarakatan (LPMD/K, TP PKK desa/kel.) yang aktif dengan target sebesar 80 % dan telah terealisasi sebesar 90,43 % atau tingkat pencapaian sebesar 113,43 % dan (2) Persentase KPM yang aktif dengan target 12,59 % telah terealisasi sebesar 13,53 % atau tingkat pencapaiannya adalah 107,47 %. Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.995.759.620,- telah terealisasi sebesar Rp. 6.597.754.683,- (94,31 %). Program ini didukung oleh pelaksanaan 6 kegiatan yaitu :
- a. Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - c. Pelestarian dan Pemberdayaan adat istiadat
 - d. Penguatan kapasitas lembaga adat
 - e. Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
 - f. Pemberdayaan forum/asosiasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).
3. Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa, dengan indikator kinerja program (1) Persentase peningkatan aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemdes dengan

terget 10 % dan realisasi 9 % sehingga tingkat pencapaiannya 90 %; (2) Persentase desa yang telah menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang tepat waktu dengan target 20 % dan realisasi 20 % sehingga tingkat pencapaiannya 100 %; (3) Persentase desa yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahunan dengan target 20 %, terealisasi 20 % sehingga tingkat pencapaiannya 100 %. Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.509.561.758,- telah terealisasi sebesar Rp. 6.213.533.748,- (95,45 %).

Program ini didukung oleh pelaksanaan 8 kegiatan Yaitu :

- a. Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - b. Evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa;
 - c. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - d. Pendataan dan Pendayagunaan profil desa/kelurahan;
 - e. Evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan;
 - f. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - g. Pembinaan Penataan Aset Desa;
 - h. Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Program Peningkatan kerjasama desa, dengan indikator program (1) Jumlah kerjasama desa di Jawa Timur dalam pembangunan kawasan perdesaan dengan target 18 kerjasama dan terealisasi 127,78 %; (2) Jumlah kerjasama pendayagunaan sarana prasarana desa dengan target 12 kerjasama telah terealisasi 100 %; (3) Jumlah kerjasama pemanfaatan dan pendayagunaan TTG dengan target 6 kerjasama telah terealisasi 83,33 %. Alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 3.754.844.200,- telah terealisasi Rp. 3.581.971.689,- (95,40%), Program ini didukung oleh pelaksanaan 6 kegiatan sebagai berikut :
- a. Pemberdayaan sumberdaya lokal berbasis kawasan perdesaan
 - b. Pembangunan potensi kawasan perdesaan
 - c. Pembinaan pendayagunaan sarana perdesaan
 - d. Pemberdayaan kualitas prasarana perdesaan
 - e. Pendayagunaan TTG
 - f. Inovasi TTG

**Tabel . 2.15. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2019
PROVINSI JAWA TIMUR**

PD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
113.100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
113.100.01. 019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran									
		- Persentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%)	83%	0%	82%	82%	100%	83%	83%	100,00%
		- Jumlah Jenis ATK yang tersedia (Jenis)	69	69					69	100%
		- Jumlah Tenaga Jasa Pengemudi yang tersedia (orang)	3	3					3	100%
		- Jumlah Tenaga Jasa Pengamanan yang tersedia (orang)	12	12					12	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah Jasa Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistim Informasi PNS yang tersedia (Orang)	90	90					90	100%
		- Jumlah Tenaga Tim Pengadaan Barang/Jasa yang tersedia (orang)	60	60					60	100%
		- Jumlah Pegawai Tidak Tetap Non PNS yang tersedia (orang)	25	25					25	100%
		- Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diasuransikan (jenis)	6	6					6	100%
		- Jumlah Jenis barang cetakan (jenis)	12	12					12	100%
		- Jumlah Peserta Rapat (orang)	150	150					150	100%
		- Jumlah SPJ kegiatan yang disampaikan tepat waktu (berkas kegiatan)	34	34					34	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah Laporan realisasi anggaran secara berkala yang disusun (dokumen)	16	16					16	100%
		- Jumlah LRA dan Neraca yang disusun akhir tahun (dokumen)	11	11					11	100%
		- Jumlah DKKB yang disusun (dok)	60	60					60	100%
113.100.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
113.100.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana									
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	3084	0%	1.532	1.532	0%	1.552	3.084	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah jenis alat listrik dan elektronik yg tersedia (jenis)	34	34					34	100%
		- Jumlah plakat yang tersedia (buah)	40	35					35	88%
		- Jumlah tagihan rekening listrik, telfon, air yang dipenuhi (bulan)	24	24					24	100%
		- Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (explr)	79	79					79	100%
		- Jumlah dokumentasi kegiatan Bapemas (kali)	22	20					20	91%
		- Jumlah umbul-umbul / bendera yg terserdia (buah)	30	35					35	117%
		- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (jenis)	22	22					22	100%
113.100.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Prasarana									
		- Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang dipelihara (unit)	34	0	17	17	100%	17	34	100,00%
		- Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin (unit)	99	99					99	100%
		- Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (kali)	28	28					28	100%
		- Jumlah pemeliharaan Gedung kantor (gedung)	27	27					27	100%
113.100.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah/Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
113.100.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Pembinaan Sumber Daya Aparatur									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Perangkat Daerah (2018-2019)									
		- Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal (orang)	35	11	5	5	100%	5	21	60,00%
		- Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan Kapasitas SDM (orang)	1038	388	500	500	100%	500	1.388	133,72%
		Jumlah pegawai yang mengikuti In House Training Penatausahaan Keuangan	250	235					235	94,00%
		- Jumlah Peserta Pembinaan mental spiritual (orang)	1052	1460					1.460	138,78%
		- Jumlah Peserta Rapat peningkatan Kapasitas SDM (orang)	1038	388					388	37,38%
		- Jumlah pakaian dinas PDH pegawai yang tersedia (Buah)	373	373					373	100,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah atribut pegawai yang tersedia (Buah)	373	373					373	100,00%
		- Jumlah sepatu dinas/olah raga yang tersedia (Buah)	373	373					373	100,00%
113.100.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah/Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah									
		- Jumlah konsultasi (kali)	328	178	60	60	100%	70	308	94%
113.100.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
113.100.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan									
		- Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (Dokumen)	36	20	8	8	100%	8	36	100%
		- Jumlah Rapat Koordinasi Bapemas se Jawa Timur yang dilaksanakan (kali)	6	4					4	67%
		- Jumlah dokumen perjanjian kinerja yang tersusun (dokumen)	21	21					21	100%
		- Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan (orang)	130	130					130	100%
113.100.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun (Dokumen)	42	22				10	32	76%
		- Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Pelaporan	65	65					65	100%
		- Jumlah edisi Buletin Gema Desa yang diterbitkan (Edisi)	30	30					30	100%
113.100.08. 003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistim Informasi Data									
		- Jumlah update database perangkat daerah (Kali)	20	12	4	4	100%	4	20	100%
		- Jumlah jenis pemeliharaan Sistem Informasi Data (jenis)	2	2					2	100%
		- Jumlah frekwensi rapat koordinasi tim PDE (Kali)	20	12					12	60%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
113.100.08. 004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan									
		- Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan yang tersusun (Dokumen)	68	0	34	34	0%	28	62	91%
113.100.23/ 31	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat/Progr am Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang terbentuk	420	180	200	212	106%	40	432	103%
		Jumlah RTS yang memiliki usaha	65.873	31.532	33.773	36.324	107,55%	500	68356	104%
113.100.23. 01/31.003	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat/Pembe rdayaan Usaha Ekonomi									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Masyarakat									
		- Jumlah Kelompok UEM yang difasilitasi (UEM)	39	12	13	13	100%	14	39	100%
		- Jumlah UEM yang difasilitasi akses permodalan (UEM)	162	0	60	140	233%	90	230	142%
		- Jumlah UEM yang dibina oleh Pelaku Dunia Usaha (UEM)	9	0	3	20	667%	3	23	256%
		- Jumlah peserta rakor/orientasi/bimtek pengelola UEM (orang)	324	70	120	300	250%	160	530	164%
		- Jumlah UEM yang difasilitasi pengembangan pemasaran usaha dengan pihak terkait (UEM)	9	3	3	3	100%	3	9	100%
113.100.23.02/31.001	Pengembangan Pasar Desa/Pemberdayaan Pasar Desa									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah data Pasar Desa yang memiliki pengelola pasar (dokumen)	29	29	29	29	100%	29	44	150%
		- Jumlah data Pasar Desa yang sudah memiliki Perdes (dokumen)	29	29	29	29	100%	29	44	150%
		- Jumlah Pasar Desa terbaik Jawa Timur (pasar)	16	10	4	6	150%	6	22	138%
		- Jumlah peserta rakor/orientasi/bimtek Pengelola Pasar Desa	149	40	60	117	195%	160	317	213%
		- Jumlah pasar desa yang terbantu	30	0	0	0	0%	0	0	0%
		- Jumlah peserta orientasi pengelola pasar yang mendapat bantuan	90	0	0	0	0%	0	0	0%
113.100.23.04/31.002	Pemberdayaan BUMDes									
		- Jumlah data BUMDesa yang terbentuk di Jatim (BUMDes)	29	29	29	29	100%	29	44	150%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah data BUMDesa yang aktif (BUMDes)	29	29	29	29	100%	0	29	100%
		- Jumlah BUMDesa terbaik Jawa Timur (BUMDesa)	22	10	3	6	200%	6	22	100%
		- Jumlah pengelola BUMDesa yang diberikan orientasi/bimtek (orang)	72	24	50	89	178%	226	339	471%
		- Jumlah BUMDesa yang dibantu	30	0	0	0	0%	0	0	0%
		- Jumlah peserta orientasi pengurus BUMDesa yang mendapat bantuan	90	0	0	0	0%	0	0	0%
113.100.23.05/31.004	Jalin Matra Penanggulangan Feminsasi Kemiskinan									
		Jumlah RTS Jalin Matra yang dimonev (RTS)	1.600	0	0	0	0%	1600	1.600	100%
		- Jumlah KRTP yang diberikan bantuan (KRTP)	73.275	50.276	25.094	25.083	100%	8.275	83.634	114%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah peserta rakor/orientasi/bimtek pengelola kegiatan (orang)	7.554	3.358	4.462	4.004	90%	1.178	8.540	113%
		- Jumlah pendamping yang mendampingi pengelolaan kegiatan (orang)	3.715	1.826	1.945	1.835	94%	619	4280	115%
113.100.23/06/31.005	Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat									
		- Jumlah program/kegiatan yang diinventarisir terkait program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program pemberdayaan masyarakat (program/kegiatan)	25	15	5	5	100%	10	30	120%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah peserta rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program pemberdayaan masyarakat (orang)	278	76	96	140	146%	140	356	128%
113.100.23. 07/31.006	Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan									
		- Jumlah lembaga desa yang diberikan bantuan	393	180	200	212	106%	115	507	129%
		- Jumlah pengelola kegiatan yang diberikan orientasi (orang)	2.350	1.567	477	609	128%	449	2.625	112%
		- Jumlah pendamping yang mendampingi pengelolaan kegiatan (Orang)	486	222	264	263	100%	141	626	129%
113.100.3 1.007	Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah RTSM yang diberikan bantuan (RTSM)	39.989	28.453	11.468	11.241	98%	5.527	45.221	113%
		- Jumlah pengelola kegiatan yang diberikan orientasi (orang)	1.861	475	1.386	1.646	119%	0	2121	114%
		- Jumlah peserta rakor (orang)	270	143	150	160	107%	528	831	308%
		- Jumlah pendamping yang mendampingi pengelolaan kegiatan (orang)	1.220	514	761	771	101%	300	1585	130%
113.100.3 1.008	Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal									
		- Jumlah Desa sangat tertinggal dan Desa Tertinggal yang diberikan bantuan (desa)	175	0	0	0	0	75	75	43%
		- Jumlah pengelola kegiatan yang diberikan orientasi (orang)	700	0	400	496	124%	150	646	92%
		- Jumlah peserta rakor (orang)	700	0	140	140	100%	300	440	63%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah pendamping yang mendampingi pengelolaan kegiatan (orang)	175	0	0	0	0	5	5	3%
113.100.22/34	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA/Program Peningkatan kerjasama desa	Jumlah kerjasama desa di Jawa Timur dalam pembangunan kawasan perdesaan	54	11	18	23	128%	25	59	109%
		Jumlah kerjasama pendayagunaan sarana prasarana desa	36	11	12	12	100%	13	36	100%
		Jumlah kerjasama pemanfaatan dan pendayagunaan TTG	18	6	6	5	83%	6	17	94%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
113.0100.22 .04/34.001	Kerjasama desa dalam pengembangan sumberdaya lokal berbasis kawasan perdesaan/Pemberdayaan sumberdaya lokal berbasis kawasan perdesaan									
		- Jumlah kawasan perdesaan yang dipetakan untuk pengembangan kawasan yang dikerjasamakan (kawasan)	31	9	10	23	230%	15	47	152%
		- Jumlah peserta workshop Kerjasama Pengembangan Kawasan Pedesaan (orang)	210	47	108	71	66%	90	208	99%
		- Jumlah peserta Bimtek Kerjasama Pengembangan Kawasan Pedesaan (orang)	210	56	76	57	75%	90	203	97%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
113.0100.22 .06/34.02	Kerjasama pembangunan potensi kawasan perdesaan/Pembangunan potensi kawasan perdesaan									
		- Jumlah pemetaan potensi kerjasama pembangunan kawasan perdesaan (kawasan)	33	5	8	22	275%	20	47	142%
		- Jumlah peserta workshop Kerjasama Pembangunan Kawasan Pedesaan (orang)	240	49	76	64	84%	120	233	97%
113.0100.22 .05/34.03	Kerjasama Peningkatan pendayagunaan sarana pedesaan/Pembinaan pendayagunaan sarana pedesaan									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah potensi Kerjasama pendayagunaan sarana perdesaan yang dipetakan (potensi)	25	6	7	7	100%	12	25	100%
		- Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Kerjasama Peningkatan pendayagunaan sarana perdesaan (orang)	240	55	72	136	189%	120	311	130%
113.0100.22 .07/34.04	Kerjasama Pembangunan kualitas prasarana perdesaan/Pemberdayaan kualitas prasarana perdesaan									
		- Jumlah pemetaan kawasan potensi Kerjasama Peningkatan kualitas prasarana perdesaan yang difasilitasi (kawasan)	22	5	5	5	100%	12	22	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah data dan informasi kerjasama peningkatan kualitas prasarana perdesaan (dok)	22	5	5	5	100%	12	22	100%
		- Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Kerjasama Peningkatan kualitas prasarana perdesaan (orang)	240	57	60	43	72%	120	220	92%
113.0100.22 .01/34.05	Pendayagunaan TTG									
		- Jumlah Kerjasama pemanfaatan Jenis alat TTG (kerjasama)	25	5	2	2	100%	15	22	88%
		- Jumlah Peserta Bimtek Pendayagunaan TTG (orang)	181	0	0	0	0%	105	105	58%
		- Jumlah jenis alat alat TTG yang dipetakan di Jatim (jenis)	120	100	10	17	170%	10	127	106%
113.0100.22 .02/34.06	Inovasi TTG									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah Kerjasama pengembangan inovasi TTG (Kerjasama)	5	1	1	1	100%	3	5	100%
		- Jumlah inovasi TTG yang dapat difasilitasi (buah)	6	0	2	2	100%	5	7	117%
		- Jumlah peserta gelar TTG (kelompok)	96	29	20	20	100%	38	87	91%
		- Jumlah jenis peralatan TTG yang diikuti dalam gelar TTG (jenis)	96	40	20	20	100%	38	98	102%
		- Jumlah Peserta workshop/lokakarya/rakortek TTG (orang)	266	0	76	76	100%	114	190	71%
113.0100.24 /32	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan/Program	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang aktif	85%	75,20%	80%	90,43%	113,04%	85%	251%	295%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.									
		Persentase KPM yang aktif (%)	40%	7,27%	13%	13,53%	107,47%	20,9%	42%	104%
113.0100.24 .02/32.01	Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan desa/kel.									
		- Jumlah data Lembaga Kemasyarakatan ds/kel yang aktif (dok)	190	50	38	38	100%	38	126	66%
		- Jumlah Pengurus Lembaga kemasyarakatan ds/kel yang diberikan orientasi/Bimtek (orang)	449	76	119	114	96%	119	309	69%
		- Jumlah Lembaga pelaksana Gotong Royong terbaik (lembaga)	24	6	8	8	100%	8	22	92%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
113.0100.24.03/32.02	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga									
		- Jumlah dok data TP PKK ds/kel yang aktif (dok)	38	38	38	38	100%	38	38	100%
		- Jumlah TP PKK yang difasilitasi (lembaga)	38	0	0	0	0%	38	38	100%
		- Jumlah Pengurus TP PKK yang diberikan sosialisasi/orientasi peningkatan kapasitas SDM nya (orang)	1279	347	1598	1.520	95%	608	2475	194%
		- Jumlah pengurus/anggota TP PKK yang diberikan penghargaan (orang)	228	76	76	76	100%	76	228	100%
		- Jumlah Pemenang lomba 10 program pokok PKK Jatim (TP PKK)	12	14	31	31	100%	4	49	408%
		- Jumlah Peserta Rakor PKK (orang)	228	76	300	300	100%	76	452	198%
		- Jumlah Peserta Jambore PKK (orang)	1068	349	0	0		17	366	34%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
113.0100.24 .04/32.05	Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)									
		- Jumlah KPM yang dilatih (KPM) (orang)	1370	0	200	152	0%	150	302	22%
		- Jumlah Peserta Sosialisasi/Temu karya/Bimtek KPM (orang)	240	88	76	118	155%	80	286	119%
113.0100.24 .07/32.04	Penguatan Kapasitas Lembaga Adat									
		- Jumlah Lembaga adat yang di Perkades Kan (lembaga)	50	10	15	19	127%	20	49	98%
		- Jumlah Pengurus Lembaga adat yg diberikan peningkatan kapasitas SDM (orang)	863	58	305	267	88%	100	425	49%
113.0100.17 .58/32.03	Pelestarian dan Pemberdayaan adat istiadat									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah peserta sosialisasi/workshop/orientasi (orang)	434	58	60	287	478%	216	561	129%
		- Jumlah lembaga adat yang difasilitasi akses pengembangannya dengan pihak terkait (lembaga)	43	8	15	42	280%	20	70	163%
113.0100.32 .06	Pemberdayaan forum/asosiasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Jawa Timur									
		- Jumlah terbentuknya forum KPM di Jawa Timur (forum)	22	0	8	12	0%	14	26	118%
		- Jumlah Peserta Bimtek (orang)	304	0	76	106	0%	72	178	59%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
113.0100.17 /33	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	- Persentase peningkatan aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur (%)	28%	7%	13%	13%	100%	10%	30%	107%
		- Persentase desa yang telah menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang tepat waktu	48%	13%	20%	20%	100%	25%	58%	121%
		- Persentase desa yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahunan (%)	48%	13%	20%	20%	100%	25%	58%	121%
113.0100.17 .66/33.01	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/Pembinaan									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	kapasitas aparatur pemerintahan desa									
		- Jumlah data desa yang Aparatur pemerintahan desanya telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemdes (kab/kota)	30	30	30	30	100%	30	45	150%
		- Jumlah peserta rakor (orang)	394	52	60	55	92%	90	197	50%
		- Jumlah peserta pelatihan aparatur desa	660	0	150	131	0%	180	311	47%
113.0100.17 .67/33.02	Evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa									
		- Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang dievaluasi kinerjanya (kades/perangkat desa)	425	0	150	147	0%	30	177	42%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
113.0100.17 .64/33.03	Pelaksanaan dan pengendalian perencanaan partisipatif pembangunan desa/Pembinaan perencanaan pembangunan desa									
		- Jumlah peserta rakor perencanaan pembangunan desa (orang)	270	48	60	46	77%	90	184	68%
		- Jumlah data kabupaten yang telah menerapkan aplikasi perencanaan pembangunan desa (dokumen)	30	0	30	30	100%	30	60	200%
		- Jumlah Bimtek yang dilaksanakan (kali)	10	1	2	2	100%	3	6	60%
113.0100.24 .01/33.04	Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		- Jumlah desa yang telah memiliki profil desa/kel (desa/kel)	8504	7791	7676	8.497	111%	8.504	24.792	292%
		- Jumlah desa yang melakukan update data profil desa/kel (desa/kel)	8504	7791	7673	8.497	111%	8.504	24.792	292%
		- Jumlah peserta pelatihan pokja profil desa/kel (orang)	456	0	90	67	0%	114	181	40%
113.0100.17 .53/33.05	Evaluasi tingkat perkembangan desa/kel									
		- Jumlah desa/kel berhasil (ds/kel)	24	8	8	8	100%	8	24	100%
		- Jumlah peserta rakor/sosialisasi TPD	248	48	76	67	88%	114	229	92%
		- Jumlah data TPD (dokumen)	60	0	30	27	90%	30	57	95%
113.0100.17 .69/33.06	Pembinaan Pengelolaan Administrasi pemerintahan desa									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		Jumlah desa yang telah melaksanakan tertib administrasi (desa)	90	30	30	30	100%	60	120	133%
		Jumlah Peserta Bimtek (orang)	114	0	120	105	88%	120	225	197%
113.0100.17 .68/33.07	Pembinaan penataan aset desa									
		Jumlah desa yang telah melakukan penataan aset desa (desa)	90	0	30	30	100%	60	90	100%
		Jumlah instrumen pendataan desa yang telah melakukan penataan aset desa (instrumen)	30	29	30	30	100%	60	119	397%
		Jumlah Peserta Pembinaan Penataan aset desa (orang)	360	102	120	156	130%	420	678	188%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (RENSTRA PD) TAHUN 2014 - 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN n-1 (2019)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d dengan tahun 2019 (TAHUN BERJALAN/n-1)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
113.0100.22.03/33.08	Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)/Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa									
		- Jumlah instrumen evkin pendamping desa yang dievaluasi (dok)	90	30	30	30	100%	30	90	100%
		- Jumlah Pendamping desa yang berkinerja baik (orang)	8.436	3783	2.812	3.719	132%	2.960	10.462	124%
		- Jumlah Bimtek P3MD yang dilaksanakan (kali)	6	0	2	2	0	2	4	67%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengatur daerah untuk melaksanakannya sehingga dilakukan penataan terhadap organisasi perangkat daerah dengan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, tanggal 21 Oktober 2016.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan, dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

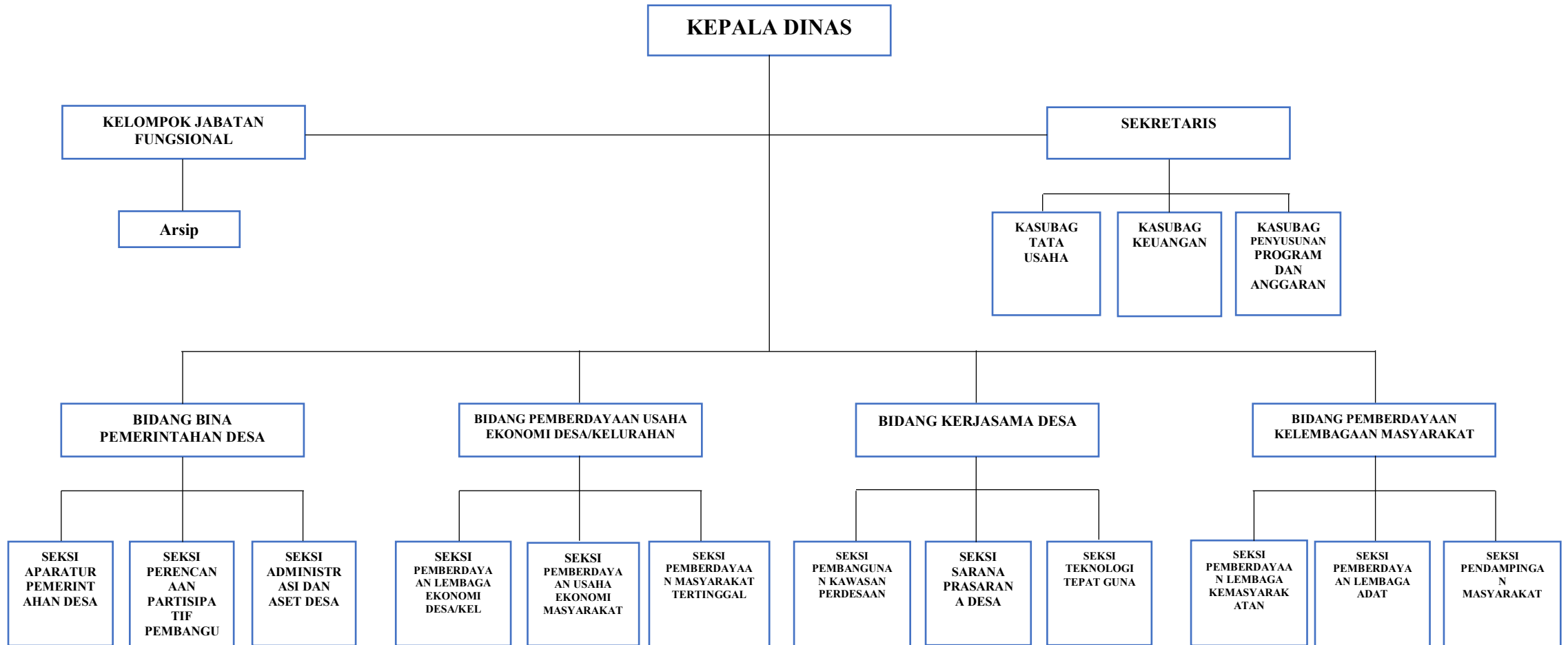
Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (2) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (4) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, sebagaimana disajikan dalam Bagan dibawah ini.

Bagan Struktur organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR**



Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 adalah Persentase PKK Aktif, yang tingkat pencapaian setiap tahun sudah mencapai 100 %. Sehingga dirumuskan indikator mandiri berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Kinerja pelayanan dinas mendukung pencapaian kinerja utama pemerintah Provinsi Jawa Timur persentase penduduk miskin, sehingga dalam perumusan indikator kinerjanya memadukan pencapaian kinerja IKK dan IKU Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2019 – 2024, dengan Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah pembangunan Tahun 2019 – 2024 adalah Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan; Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; (termasuk di dalamnya adalah PKK aktif kinerja IKK); Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa; dengan demikian indikator kinerjanya sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.16. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

NO.	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2018 (n-2)	TAHUN 2019 (n-1)	TAHUN 2020 (n)	TAHUN 2021 (n+1)	TAHUN 2018 (n-2)	TAHUN 2019 (n-1)	TAHUN 2020 (n)	TAHUN 2021 (n+1)	
	Persentase tumbuhnya UEM desa/kelurahan			38%	0,40%			41,36%	-			IKD 2014 - 2019 Terlampaui
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif			80%	85%			80%	-			IKD 2014 - 2019 Terpenuhi
1	Jumlah UEM yang berdaya			34.455	96	-	-	36.536	-	-	-	IKU PD Terlampaui
2	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif			6,6%	6,25%	0%	0%	20,25%	-	-	-	IKU PD Terlampaui
3	Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur			6%	10%	0%	0%	6%	-	-	-	IKU PD Terpenuhi
	Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal				20,49 %	19,52%	18,55%	21,46 %				IKD 2019 - 2024
1	Persentase peningkatan Lembaga Ekonomi desa/kelurahan yang berdaya					7%	7%					IKU Renstra 2019 - 2024
2	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif					16,50%	18,97%					IKU Renstra 2019 - 2024
3	Persentase peningkatan status desa					9%	10%					IKU Renstra 2019 - 2024
4	Persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan					15%	17,5%					IKU Renstra 2019 - 2024

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tetap mempertimbangkan isu – isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) di PD Provinsi Jawa Timur yang diprakarsai oleh Bappeda Prov. Jatim menjadi forum penting dalam perumusan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, sedangkan KISS dengan Pemerintah kab./Kota dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang secara berkala dilaksanakan dalam rangka sinergi program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kab./Kota.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain :

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan Tupoksi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program/kegiatan;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka sinergitas pelaksanaan program/kegiatan;
3. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan;
4. Peraturan perundang – undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas;

Sebagaimana diketahui bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud, telah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, tanggal 21 Oktober 2016;
- (3) Sumberdaya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, siap untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mempercepat tercapainya keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa;
- (4) Terjalannya koordinasi yang baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa dan PDTT, Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten/Kota se Jawa Timur, maupun instansi terkait lainnya memungkinkan berfungsinya seluruh elemen organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan programnya.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- (1) Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan *outcome*, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Masih lemahnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan data base di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
- (3) Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);
- 2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat .

- 3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

b. Faktor Tantangan Organisasi

- 1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan – persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/swasta;
- 2) Persoalan kemiskinan yang masih berada diatas angka nasional, mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- 3) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
- 4) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- 5) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional dalam pengelolaan pemerintahan desa;

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penanggulangan kemiskinan dan sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan

sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang – undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD 2019 – 2024 dan Renstra PD 2019 – 2024.

Prioritas di tahun 2020 adalah penanganan masyarakat desa tertinggal dimana di Jawa Timur, berdasarkan data Indeks Desa Membangun Kementerian Desa PDTT masih terdapat 3 desa sangat tertinggal dan 362 desa tertinggal yang perlu penanganan.

**Tabel. 2.17. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2020
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.130.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				47.969.452.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				47.969.452.000	
1.0.13.01	Program Pelayanan Kesekretariatan		Persentase indikator program yang tercapai	85%	12.033.772.408	Program Pelayanan Kesekretariatan		Persentase indikator program yang tercapai	85%	12.033.772.408	
			Persentase realisasi anggaran	92%				Persentase realisasi anggaran	92%		
			Indeks profesionalitas ASN	88%				Indeks profesionalitas ASN	88%		
1.0.13.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	10	1.406.354.152	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	10	1.406.354.152	
1.0.13.01.002	Pengelolaan Administrasi Keuangan		Jumlah laporan keuangan	28	2.107.223.401	Pengelolaan Administrasi Keuangan		Jumlah laporan keuangan	28	2.107.223.401	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.0.13.01.003	Ketatausahaan dan Kepegawaian		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	4	8.520.194.855	Ketatausahaan dan Kepegawaian		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	4	8.520.194.855	
1.0.13.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan		Persentase Lembaga Ekonomi Desa/kelurahan yang berkembang dan maju	8 %	19.015.554.183	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan		Persentase Lembaga Ekonomi Desa/kelurahan yang berkembang dan maju	8 %	19.015.554.183	
1.0.13.15.002	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Jawa Timur	Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan yang naik status	30 BUMDesa	1.898.090.082	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Jawa Timur	Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan yang naik status	30 BUMDesa	1.898.090.082	
			Jumlah pasar desa yang difasilitasi	30 pasar				Jumlah pasar desa yang difasilitasi	30 pasar		
1.0.13.15.003	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	Jawa Timur	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan UEM	30 desa	1.702.652.000	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	Jawa Timur	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan UEM	30 desa	1.702.652.000	
1.0.13.15.004	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan	Jawa Timur	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berdaya di perdesaan	1.900 RTM	13.388.200.000	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan	Jawa Timur	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berdaya di perdesaan	1.900 RTM	13.388.200.000	
1.0.13.15.001	Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal	Jawa Timur	Jumlah desa tertinggal/sangat tertinggal yang terfasilitasi peningkatan status IDM	30 desa	2.026.612.101	Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal	Jawa Timur	Jumlah desa tertinggal/sangat tertinggal yang terfasilitasi peningkatan status IDM	30 desa	2.026.612.101	
1.0.13.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	31,62%	7.049.277.444	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	31,62%	7.049.277.444	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.0.13.16.001	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jawa Timur	Jumlah LPMD/K, Posyandu, PKK, Karang Taruna yang difasilitasi	10.753 lembaga	2.465.840.332	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jawa Timur	Jumlah LPMD/K, Posyandu, PKK, Karang Taruna yang difasilitasi	10.753 lembaga	2.465.840.332	
1.0.13.16.002	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jawa Timur	Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi	2.539 pengurus	2.541.767.796	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jawa Timur	Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi	2.539 pengurus	2.541.767.796	
1.0.13.16.003	Pemberdayaan lembaga adat	Jawa Timur	Jumlah lembaga adat yang terbentuk	20 lembaga adat	1.020.978.000	Pemberdayaan lembaga adat	Jawa Timur	Jumlah lembaga adat yang terbentuk	20 lembaga adat	1.020.978.000	
1.0.13.16.005	Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jawa Timur	Jumlah KPM yang difasilitasi	80 KPM	1.020.691.316	Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jawa Timur	Jumlah KPM yang difasilitasi	80 KPM	1.020.691.316	
1.0.13.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa		Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur	12%	6.166.257.193	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa		Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur	12%	6.166.257.193	
1.0.13.17.001	Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jawa Timur	Jumlah aparatur pemerintahan desa yg diberikan pembinaan	210 aparatur	1.368.969.000	Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jawa Timur	Jumlah aparatur pemerintahan desa yg diberikan pembinaan	210 aparatur	1.368.969.000	
1.0.13.17.003	Pembinaan Perencanaan pembangunan desa	Jawa Timur	Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan update pendataan	8.848 desa/kelurahan	2.236.093.076	Pembinaan Perencanaan pembangunan desa	Jawa Timur	Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan update pendataan	8.848 desa/kelurahan	2.236.093.076	
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	23 desa/kelurahan				Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	23 desa/kelurahan		

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.0.13.17.002	Pembinaan Administrasi dan aset desa	Jawa Timur	Jumlah desa yang tertib pengelolaan administrasi dan aset desa	60 desa	2.023.623.117	Pembinaan Administrasi dan aset desa	Jawa Timur	Jumlah desa yang tertib pengelolaan administrasi dan aset desa	60 desa	2.023.623.117	
1.0.13.17.008	Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jawa Timur	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dana desa	2.827 desa	537.572.000	Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jawa Timur	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dana desa	2.827 desa	537.572.000	
1.0.13.18	Program Peningkatan kerjasama desa		Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim	18,95%	3.704.590.772	Program Peningkatan kerjasama desa		Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim	18,95%	3.704.590.772	
1.0.13.18.001	Pemberdayaan sumber daya kawasan perdesaan	Jawa Timur	Jumlah desa yang dikerjasamakan	6 desa	1.291.161.279	Pemberdayaan sumber daya kawasan perdesaan	Jawa Timur	Jumlah desa yang dikerjasamakan	6 desa	1.291.161.279	
			Jumlah kawasan perdesaan	6 kawasan				Jumlah kawasan perdesaan	6 kawasan		
1.0.13.18.002	Pendayagunaan sarana prasarana perdesaan	Jawa Timur	Jumlah lembaga pengelola sarana prasarana yang difasilitasi	20 lembaga	1.212.928.405	Pendayagunaan sarana prasarana perdesaan	Jawa Timur	Jumlah lembaga pengelola sarana prasarana yang difasilitasi	20 lembaga	1.212.928.405	
	Inovasi dan pendayagunaan TTG	Jawa Timur	Jumlah inovasi TTG yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa	10 TTG	1.200.501.088	Inovasi dan pendayagunaan TTG	Jawa Timur	Jumlah inovasi TTG yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa	10 TTG	1.200.501.088	

Sesuai dengan Misi ke 2 (dua) Pembangunan Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 yaitu **“Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan social, Pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan”** dan sebagaimana prioritas Tema Rancangan RKPD Tahun 2020, yaitu **“PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA JAWA TIMUR UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”**, maka Rancangan prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2020 adalah :

1. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan;
2. Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta Manajemen Kebencanaan;
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
5. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.

Khusus untuk penanggulangan kemiskinan maka upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus mengurangi penduduk miskin antara lain akan dilakukan melalui program – program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu :

1. Program Peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan

Isu Angka Kemiskinan Jatim yang masih diatas nasional, Persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada akhir 2018 sebesar 10,85 % masih diatas rata – rata angka nasional. Melalui program ini diupayakan tumbuhnya usaha – usaha ekonomi masyarakat, utamanya di desa, seiring dengan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga ekonomi yang ada didesa antara lain Pasar Desa dan BUMDesa sehingga akan memperkuat pilar perekonomian desa, menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan berdampak terhadap pendapatan masyarakat dan peningkatan taraf hidupnya. Prioritas Kegiatan adalah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan, selain itu dilakukan pula fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, Pemberdayaan Lembaga ekonomi desa dan Pemberdayaan masyarakat tertinggal.

2. Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa

Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan optimisme pengelolaan pembangunan di desa yang didukung dengan sumber – sumber pembiayaan dari berbagai sektor dan menjadi prioritas nasional. Hal tersebut membutuhkan pengelolaan manajemen pembangunan yang profesional, sehingga pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan dapat berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akuntabel. Tiga Pilar Utama dalam Lembaga Pemerintahan Desa sebagaimana penjelasan umum UU Desa terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Lembaga Adat. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa harus mampu mensinergikan ketiga pilar dimaksud. Melalui Program ini akan difasilitasi peningkatan kapasitas 2 pilar yaitu Pemerintah Desa dan BPD sedangkan pilar ketiga akan difasilitasi melalui Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Pemerintah Desa dan BPD sebagai bagian integral untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa akan difasilitasi melalui kegiatan Penyusunan data pokok desa yaitu profil desa dan kelurahan di Jatim; Penyusunan databased perencanaan desa (RPJM dan RKP dan APBD desa); pendampingan desa, pembinaan kapasitas aparatur desa dan pembinaan administrasi serta aset desa.

3. Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.

Sebagai salah satu pilar dari 3 pilar lembaga pemerintahan desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa yang membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Amanah Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab./Kota dan Lembaga Non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada di desa. Melalui Program ini akan dilaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan (LPMD/K), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan

lembaga adat, Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat selaku unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong.

4. Program Peningkatan kerjasama desa

Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa serta berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Melalui program ini dilaksanakan fasilitasi Pemberdayaan sumber daya kawasan perdesaan, Pendayagunaan sarana prasarana perdesaan dan inovasi dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna/TTG.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan isu – isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui Program Peningkatan usaha ekonomi desa/kel, Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa, Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. dan Program Peningkatan kerjasama desa dilakukan upaya – upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Hasil Verifikasi Usulan Kabupaten / Kota untuk RPJMD, RENSTRA 2019-2024 (Rancangan Awal)

	Perangkat Daerah / Program / Usulan	Lokasi	Target	Satuan	Nilai	Verifikasi PD		Verifikasi Bidang	
Perangkat Daerah	1130100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Kabupaten / Kota	35.01	Pacitan							
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa							
	1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan	Kabupaten Pacitan	166	Desa	150.000.090	Akomodir	Masuk Program Peningkatan Kapasitas pemerintahan Desa	Akomodir	kegt. pembinaan kapasitas aparatur Pemdes..
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.18	Program Peningkatan kerjasama desa							
	2 Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan	Kabupaten Pacitan	12	Desa/Kecamatan	200.000.004	Akomodir	Masuk Kegiatan Pembangunan Potensi Kawasan Perdesaan	Akomodir	kegt. pemberdayaan sbr daya kawasan perdesaan
Kabupaten / Kota	35.02	Ponorogo							
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan							
	11 Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2)	Desa- desa di Kabupaten Ponorogo	20	Desa	2.000.000.000	Tidak Akomodir	Usulan Kegiatan sudah tidak dialokasikan	Tidak Akomodir	sudah tidak dialokasikan
	11 Penanggulangan Femininisasi Kemiskinan	Desa- desa di Kabupaten Ponorogo	30	desa	1.500.000.000	Tidak Akomodir	Usulan Kegiatan sudah tidak dialokasikan	Tidak Akomodir	sudah tidak dialokasikan
	11 Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin	Desa- desa di Kabupaten Ponorogo	30	desa	1.500.000.000	Tidak Akomodir	Usulan Kegiatan sudah tidak dialokasikan	Tidak Akomodir	sudah tidak dialokasikan
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.18	Program Peningkatan kerjasama desa							
	11 Penetapan Pelaksanaan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan (Pemberdayaan Sumber Daya Lokal berbasis Kawasan Perdesaan untuk pengembangan Wisata)	Desa : Biting, Karang, Karangjoho,Bandar Alim, Badegan Kecamatan Badegan	1	kawasan	992.521.467	Tidak Akomodir	Kegiatan Tidak spesifik	Tidak Akomodir	usulan kegiatan belum jelas dan spesifik
	11 Perencanaan Kawasan Kawasan Perdesaan (Pembangunan Potensi Kawasan Perdesaan untuk pengembangan Wisata Sendang Bulus	Desa Pager	1	Lokasi	2.101.177.260	Tidak Akomodir	kegiatan tidak spesifik	Tidak Akomodir	kegiatan tidak spesifik
Kabupaten / Kota	35.03	Trenggalek							
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan							
	1 Tambahan Permodalan BUMDes	Kabupaten Trenggalek	5	BUMDes	500.000.000	Akomodir	Akomodir, dengan menyesuaikan alokasi	Akomodir	kegt. pemberdayan BUMdes
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/ke.							
	4 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kabupaten Trenggalek	152	Lembaga	760.000.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt pemberdayaan dan penataan LKD
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa							
	2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa terkait Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Trenggalek	152	orang	760.000.000	Akomodir	Akomodir	Akomodir	kegt. pembinaan kapasitas aparatur Pemdes

	Perangkat Daerah / Program / Usulan	Lokasi	Target	Satuan	Nilai	Verifikasi PD		Verifikasi Bidang		
Perangkat Daerah	1130100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.18	Program Peningkatan kerjasama desa								
	3	Tambahan Permodalan BUMDes Bersama	Kabupaten Trenggalek	5	BUMDESMA	750.000.000	Akomodir	Akomodir	Akomodir	kegt pemberdayaan BUMDes
Usulan Kab/Kota	1.13.31.002	Pemberdayaan BUMDesa								
	5	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Produk BUMDESMA	Kabupaten Trenggalek	5	BUMDESMA	50.000.000	Akomodir	Akomodir	Akomodir	kegt pemberdayaan BUMDes..
Kabupaten / Kota	35.04	Tulungagung								
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan								
	1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Ds. Geger Kec. Sendang,Ds. Nglurup Kec. Sendang, Ds. Mulyosari	3	paket	300.000.000	Tidak Akomodir	Bukan Kewenangan DPMD Prov. Jatim	Tidak Akomodir	Pemb, PLTMH , mengarah ke urusan Dinas ESDM
	2	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik tersebar	Tulungagung	10	paket	1.250.000.000	Tidak Akomodir	Bukan Kewenangan DPMD Prov. Jatim	Tidak Akomodir	urusan pembangunan PLTS, di Dinas ESDM
	3	Pembangunan Instalasi Biogas	Tulungagung	7	paket	1.050.000.000	Tidak Akomodir	Bukan Kewenangan DPMD Prov. Jatim	Tidak Akomodir	Bukan Kewenangan DPMD
	5	Bantuan Keuangan Revitalisasi Pasar Desa	Ds. Sukorejokulon Kec. Kalidawir,Ds. Ngrance Kec. Pakei,Ds. Kalidawir Kec.	3	desa	300.000.000	Akomodir	masuk kegiatan Pemberdayaan Pasar Desa	Akomodir	kegt pemberdayaan pasar desa
	6	Percepatan Perlindungan Kesejahteraan Rumah Tangga Desil I	Tulungagung	25	desa	2.500.000.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt percepatan penanggulangan kemiskinan di perdesaan..
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa								
	7	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	257 desa	1.285	orang	1.285.000.000	Akomodir	akomodir, menyesuaikan alokasi	Akomodir	kegt pembinaan kapasitas aparatur Pempdes
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.18	Program Peningkatan kerjasama desa								
	4	Peningkatan Ekonomi Kawasan Pedesaan melalui Pengembangan Kerjasama Antar Desa	Ds. Pucunglor Kec. Ngantru,Ds. Pinggirsari Kec. Ngantru,Ds. Srikaton Kec. Ngantru,Ds. Padangan Kec. Ngantru	1	kawasan	1.500.000.000	Akomodir	masuk Program Peningkatan Kerjasama Desa	Akomodir	Program Peningkatan Kerjasama Desa
Kabupaten / Kota	35.05	Blitar								
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan								
	1	Rumah Produksi dan alat Pengolahan Nanas	Kawasan Agroindustri Kec. Ponggok	1	paket	550.000.000	Tidak Akomodir	tidak akomodir	Tidak Akomodir	belum match dg kegt nomenklatur yg ada, nomenklatur yg ada di, DPMD , "inovasi
	4	Pengadaan Cooling Unit / Pendingin Susu	BUMDesa Makmur Abadi Desa Bendosari Kecamatan Ponggok	1	unit	130.000.000	Tidak Akomodir	usulan berupa pengadaan/ pembangunan fisik	Tidak Akomodir	tidak ada prog kegt Bantuan peralatan
	5	Pembangunan Kantor dan Ruko BUMDesma	Kawasan Perdesaan Ekowisata Kecamatan Kesamben	1	paket	200.000.000	Tidak Akomodir	usulan berupa pengadaan/ pembangunan fisik	Tidak Akomodir	tidak ada alokasi pengadaan/ pembangunan fisik
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/ke.								
	1	Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Blitar	744	orang	100.440.000	Akomodir	Akomodir	Akomodir	kegt. pemberdayan dan penataan lembaga
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa								
	8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Kabupaten Blitar	660	orang	1.980.000.000	Akomodir	akomodir, dengan menyesuaikan alokasi	Akomodir	kegt pembinaan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.18	Program Peningkatan kerjasama desa								
	2	Pembangunan Kantor dan Ruko BUMDesma	Kawasan Perdesaan Agroindustri Kecamatan Ponggok	1	paket	200.000.000	Tidak Akomodir	tidak akomodir, usulan berupa fisik bangunan	Tidak Akomodir	fisik bangunan tdk akomodir

	Perangkat Daerah / Program / Usulan	Lokasi	Target	Satuan	Nilai	Verifikasi PD		Verifikasi Bidang	
Perangkat Daerah	1130100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BKAD	Kecamatan Ponggok, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Wlingi	4	Paket	100.000.000	Tidak Akomodir	tidak akomodir, usulan berupa bantuan pengadaan fisik	Tidak Akomodir	tidak akomodir, usulan pengadaan fisik
Kabupaten / Kota	35.07	Malang							
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan							
1	Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Kec. Poncokusumo BUMDesa Kabupaten Malang	90	orang	153.000.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt. pemberdayaan lembaga ekonomi (BUMdes, pasar desa, PUEM, atau lainnya)..
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/ke.							
4	Bantuan peralatan Gamelan dalam rangka pelestarian Lembaga Adat	Desa Tulungrejo Kec. Ngantang Kab Malang	1	set	100.000.000	Tidak Akomodir	tidak akomodir	Tidak Akomodir	tidak ada progr kegiatan Bantuan peralatan Gamelan
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa							
3	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa	33 kecamatan di Kabupaten Malang	756	orang	506.520.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt pembinaan aparatur Pempdes
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.18	Program Peningkatan kerjasama desa							
2	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.	Kec. Pakisaji dan Kec. Pujon	2	unit	100.000.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt. inovasi dan pendayagunaan TTG
Kabupaten / Kota	35.08	Lumajang							
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan							
1	Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat	21 kecamatan	1	paket	200.000.000	Akomodir	Akomodir dengan menyesuaikan alokasi	Akomodir	.
2	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	17 kecamatan	1	paket	200.000.000	Tidak Akomodir	tidak akomodir	Tidak Akomodir	.
Kabupaten / Kota	35.09	Jember							
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan							
2	pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi	10 desa	10	desa	150.000.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt pemberdayaan usaha ekonomi
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/ke.							
1	membentuk lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	LPMD/K di Kabupaten Jember	55	LPMD/K	250.000.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt. pemberdayaan lembaga adat
Kabupaten / Kota	35.10	Banyuwangi							
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/ke.							
3	Peningkatan kapasitas lembaga Adat	Kabupaten Banyuwangi	189	Orang	47.250.000	Akomodir	masuk kegiatan Penguatan Kapasitas lembaga adat	Akomodir	kegt, pemberdayaan lembaga adat.
4	Peningkatan kapasitas LPMD dalam perencanaan pembangunan desa	Kabupaten Banyuwangi	189	Orang	47.250.000	Akomodir	Kegiatan Pemberdayaan dan Penataan LKD/Kel	Akomodir	kegt Pemberdayaan dan Penataan LKD/Kel
5	Pelatihan kader PKK dalam perencanaan	Kabupaten Banyuwangi	378	Orang	75.600.000	Akomodir	Kegiatan PKK	Akomodir	kegt PKK
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.18	Program Peningkatan kerjasama desa							
1	Pelatihan manajemen pengembangan Bumdesa / Bumdesa bersama	Kabupaten Banyuwangi	378	Orang	75.600.000	Akomodir	masuk Program Peningkatan Kerjasama Desa	Akomodir	agar dimasukkan Program Peningkatan Kerjasama Desa
2	Pelatihan pemanfaatan Produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades)	Kabupaten Banyuwangi	30	Kelompok	240.000.000	Tidak Akomodir	Salah Program, link kegiatan masuk pada Kerjasama Desa	Akomodir	kegt. pemberdayaan sbr daya kawasan perdesaan
Kabupaten / Kota	35.11	Bondowoso							
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan							
1	Jalin Matra Bantuan RTSM	Wonosari, Binakal, Botolingo, Cermee, Curahdami, Jambesari DS, Pakem, Ijen, Sumber Wringin, Tegalampel, Wringin	2.578	RTSM	6.445.000.000	Tidak Akomodir	kegiatan tidak lagi dialokasikan	Tidak Akomodir	.
2	Bantuan Sarana Prasarana BUM Desa	Tamanan, Sumber Wringin, Maesan, Prajekan	16	Paket	8.000.000.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	test
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.18	Program Peningkatan kerjasama desa							

	Perangkat Daerah / Program / Usulan	Lokasi	Target	Satuan	Nilai	Verifikasi PD		Verifikasi Bidang		
Perangkat Daerah	1130100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	5	Bantuan Sarana Prasarana Produksi	Kecamatan Sumber Wringin - Desa Sukorejo dan Desa Sumber Wringin		1 Paket	1.000.000.000	Tidak Akomodir	tidak akomodir	Tidak Akomodir	
Kabupaten / Kota	35.12	Situbondo								
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan								
	3	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka meningkatkan Usaha Ekonomi Desa	Kabupaten Situbondo	132	Desa	300.036.000	Akomodir	Masuk Kegiatan Pemberdayaan Bumdesa	Akomodir	kegt. pemberdayaan BUMDes
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.								
	1	Pelatihan Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka memberikan pengetahuan dan	Kabupaten Situbondo	12	Desa	200.040.000	Akomodir	Masuk pada Kegiatan Pemberdayaan dan Penataan LKD/Kel.	Akomodir	.
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa								
	2	Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagi Aparatur Desa	Kabupaten Situbondo	132	Desa	400.620.000	Akomodir	MASuk Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Akomodir	kegt. pembinaan kapasitas aparatur Pemdes
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.18	Program Peningkatan kerjasama desa								
	4	Pelatihan Membatik dalam rangka memberikan Keterampilan kepada masyarakat desa	Kabupaten Situbondo	132	Desa	150.480.000	Tidak Akomodir	tidak akomodir	Tidak Akomodir	tidak ada program kegiatan untuk pelatihan membatik
Kabupaten / Kota	35.14	Pasuruan								
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan								
	1	Pembinaan pasar desa	Kabupaten Pasuruan	189	orang	122.850.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt. pemberdayaan pasar desa
	2	Pembinaan BUMDes	Kabupaten Pasuruan	360	orang	234.000.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt pemnberdayaan BUMDes
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.								
	5	Bintek Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kabupaten Pasuruan	365	orang	237.250.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt pemberdayaan dan penataan LKD/Kel
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa								
	4	Peningkatan kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kabupaten Pasuruan	341	orang	221.650.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	program peningkatan kapasitas pemetinahan desa
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.18	Program Peningkatan kerjasama desa								
	3	Fasilitasi dan kerjasama antaer desa	Kabupaten Pasuruan	72	orang	46.800.000	Tidak Akomodir	kegiatan tidak spesifik	Akomodir	kegiatan tidak spesifik, seyogyanya di tentukan , spesifikasinya..apakah pemberdayaan sbr daya kawasan perdesaan atau pendayagunaan sarana prasarana perdesaan
Kabupaten / Kota	35.15	Sidoarjo								
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan								
	1	BOP Jalin Matra 2020	Kabupaten Sidoarjo	200	Orang	75.000.000	Tidak Akomodir	tidak akomodir	Tidak Akomodir	.
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.								
	2	TMMD 2020	Kabupaten Sidoarjo	1	Kegiatan	200.000.000	Tidak Akomodir	Bukan wewenang DPMD Prov. Jatim	Tidak Akomodir	oke
Kabupaten / Kota	35.16	Mojokerto								
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan								
	1	Modal BUMDes	Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto	1	Paket	1.000.000.000	Akomodir	akomodir menyesuaikan alokasi	Akomodir	kegt. pemberdayaan BUMDes
Kabupaten / Kota	35.17	Jombang								
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan								
	3	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes	Jombang	2	kali	200.000.000	Akomodir	Kegiatan Pemberdayaan Bumdesa	Akomodir	kegt pemberdayaan BUMDes
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.								

	Perangkat Daerah / Program / Usulan	Lokasi	Target	Satuan	Nilai	Verifikasi PD		Verifikasi Bidang	
Perangkat Daerah	1130100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	4 Pelatihan Kader atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)(PKK),(LPMD/K),(KPM), Karang Taruna, Posyandu, RT/RW dalam rangka perencanaan dan pengelolaan anggaran	jombang		6 kali	300.000.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt Pemberdayaan dan Penataan LKD/Kel
	4 Pelatihan Kader atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)(PKK),(LPMD/K),(KPM), Karang Taruna, Posyandu, RT/RW dalam rangka perencanaan dan pengelolaan anggaran			kali		Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt Pemberdayaan dan Penataan LKD/Kel
	5 Fasilitasi Ruang Terpadu Ramah Anak dan	jombang		3 kali	150.000.000	Tidak Akomodir	bukan wewenang SKPD	Tidak Akomodir	bukan wewenang DPMD
	5 Fasilitasi Ruang Terpadu Ramah Anak dan			kali		Tidak Akomodir	bukan wewenang SKPD	Tidak Akomodir	bukan wewenang DPMD
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa							
	2 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			1 kali	850.000.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt. pmbinaan kapasitas aparatur Pemdes
	6 BIMBINGAN TEHNIS SISKEUDES BAGI PPKD DAN SATGAS KECAMATAN	JOMBANG		1 kali	175.000.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	program peningkatan kapasitas pemerintahan desa
	7 BIMBINGAN TEHNIS SIPADES	JOMBANG		1 kali	175.000.000	Akomodir	Akomodir	Akomodir	Program peningkatan kapasitas pemerintahan desa
	8 Peningkatan kapasitas tenaga teknis desa	JOMBANG		1 kali	100.000.000	Akomodir	akomodir	Akomodir	kegt pembinaan kapasitas aparatur pemdes
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.18	Program Peningkatan kerjasama desa							
	1 Pelatihan Pengembangan Kawasan Pedesaan (TTG)			1 kali	50.000.000	Akomodir	pendayagunaan TTG	Akomodir	kegt. inovasi dan pendayagunaan TTG
Kabupaten / Kota	35.20	Magetan							
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan							
	1 Pelatihan Pengelola Bumdes	Kabupaten Magetan		20 peserta	37.412.000	Akomodir	Masuk pada kegiatan pemberdayaan bumdesa	Akomodir	.
	3 Pelatihan Pengelola Pasar Desa	Kabupaten magetan		20 peserta	37.412.000	Akomodir	Masuk Kegiatan Pemberdayaan Pasar Desa	Akomodir	kegt pemberdayaan pasar desa
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.							
	2 Pelatihan KPM (Posyandu)	Kabupaten Magetan		20 peserta	37.412.000	Tidak Akomodir	Posyandu tidak menjadi tupoksi KPM	Tidak Akomodir	kegt. posyandu, mengarah ke urusan
	4 Pelatihan Peningkatan kapasitas LKD (lembaga Kemasyarakatan Desa)	Kabupaten magetan		20 peserta	37.412.000	Akomodir	masuk kegiatan pemberdayaan dan penataan LKD/Kel	Akomodir	kegiatan pemberdayaan dan penataan LKD/Kel
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa							
	5 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten magetan		20 peserta	37.412.000	Akomodir	Masuk Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Akomodir	kegt pembinaan kapasitas aparatur Pemdes
	6 Pelatihan peningkatan Kapasitas BPD	Kabupaten magetan		20 peserta	37.412.000	Akomodir	masuk Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Akomodir	pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Kabupaten / Kota	35.26	Bangsalan							
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan							
	1 Pengembangan modal BUMDes untuk Simpan Pinjam	Kecamatan Kamal		2 Kegiatan	360.000.000	Akomodir	Akomodir	Akomodir	kegt. pemberdayan BUMdes
Kabupaten / Kota	35.27	Sampang							
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan							
	1 Bimbingan Teknis Pengurus BUMDesa	50 BUMDes		450 orang	225.000.000	Akomodir	Akomodir, Menyesuaikan dengan alokasi	Akomodir	kegt. pemberdayaan BUMDES
	2 Bantuan Permodalan BUMDesa	Kabupaten Sampang		20 Desa	1.000.000.000	Akomodir	Akomodir, menyesuaikan alokasi anggaran	Akomodir	kegt. pemberdayaan BUMDes

	Perangkat Daerah / Program / Usulan	Lokasi	Target	Satuan	Nilai	Verifikasi PD		Verifikasi Bidang	
Perangkat Daerah	1130100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
3	Bantuan Permodalan Usaha Ekonomi Masyarakat	Desa Jelgung Kec Robatal, Desa Taddan Kec. Camplong dan Desa Banyuates Kec. Banyuates (5 kelompok/ desa)	15	kelompok	450.000.000	Akomodir	Akomodir Menyesuaikan dengan alokasi anggaran	Akomodir	kegt. pemberdayaan usaha ekonmi desa/ kel.
4	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Ex. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP))	desa noreh kecamatan sreseh	1	desa	100.000.000	Tidak Akomodir	Usulan Kegiatan sudah tidak dialokasikan	Tidak Akomodir	kegiatan P2MPP sudah tidak dialokasikan
5	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Ex. Program Pemberdayaan Masyarakat Potensi Desa/ Kel (P3DK))	Desa Klobur Kec Sreseh	1	desa	100.000.000	Tidak Akomodir	Usulan Kegiatan sudah tidak dialokasikan	Tidak Akomodir	Kegiatan P3DK sudah tidak dialokasikan
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.18	Program Peningkatan kerjasama desa							
6	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaaan (Ex. Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui Sarana dan Prasarana)	Desa Bringin Kec. Tambelangan, Desa Somber Kec Tambelangan, Desa Olor Kecamatan Banyuates	3	desa	900.000.000	Tidak Akomodir	Usulan Kegiatan tidak dialokasikan	Tidak Akomodir	tidak dialokasikan
7	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Ex. Program Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK))	Desa Bira tengah, Kec. Sokobanah, Desa Bira Timur Kec. Sokobanah, Desa Sokobanah Daya Kec Sokobanah	3	desa	450.000.000	Akomodir	Akomodir, menyesuaikan dengan alokasi	Akomodir	kegt pemberdayaan sumber daya kawasan perdesaan
8	Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD)	Desa Gunung Eleh Kec. Kedungdung, Desa Palenggiyen Kec Kedungdung	2	desa	200.000.000	Tidak Akomodir	Usulan Kegiatan sudah tidak dialokasikan	Tidak Akomodir	Kegiatan PWTAD sudah tidak dialokasikan
9	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Ex. Program	Desa Ketapang Data Kec Ketapang	1	desa	100.000.000	Tidak Akomodir	Usulan Kegiatan sudah tidak dialokasikan	Tidak Akomodir	Usulan Kegiatan sudah tidak dialokasikan
Kabupaten / Kota	35.28	Pamekasan							
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan							
1	Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL)	Kab.Pamekasan	20	kelompok	80.000.000	Akomodir	Usulan Bukan menjadi wewenang Perangkat Daerah	Tidak Akomodir	Pemberdayaan Perempuan , mengarah ke urusan pemberdayaan perempuan di Dinas P3AK
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa							
2	Peningkatan SDM Aparatur Desa dan Badan	Kab.Pamekasan	150	peserta		Akomodir	Akomodir	Akomodir	ok
Kabupaten / Kota	35.79	Batu							
Usulan Kab/Kota	1.0.13.0100.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan							
1	Pemberdayaan Manajemen Usaha BUMDesa untuk Desa Wisata	Kota Batu	19	paket	4.750.000.000	Akomodir	akomodir, menyesuaikan alokasi kegiatan	Akomodir	kegt. pemberdayan BUMDes.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan UU 23 tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalah desa.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan Bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang – undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih fokus bekerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa, Kepala Desa akan

memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Undang – undang Desa membuka ruang selebar – lebarnya bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan kewenangan kepala desa yang istimewa, tetapi undang – undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat desa dan pembangunan desa melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga ekonomi desa dan peluang kerjasama antar desa, sehingga memungkinkan desa untuk terbuka berkembang lebih pesat secara bersama.

Dari sekian banyak Undang – undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang – Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar – benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP Tahun

2020 lebih terfokus dengan Rancangan Tema "INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH – TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL DAN BERKESINAMBUNGAN" dengan prioritas nasional :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan, Pelayanan Kesehatan dan gizi masyarakat, Layanan Pendidikan Berkualitas, Akses Perumahan dan Pemukiman Layak dan Tata Kelola Layanan Dasar;
2. Penguatan Konektivitas melalui konektivitas dan TIK, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa, Penanggulangan Bencana, Sistem Logistik Pembangunan Papua dan Papua Barat;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Peningkatan ekspor dan nilai tambah pertanian;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air, melalui produksi dan pemenuhan kebutuhan energi, produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air, daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan;
5. Stabilitas Keamanan Nasional melalui kamtibmas dan keamanan siber, Kesuksesan Pemilu, pertahanan wilayah nasional, kepastian hukum dan reformasi birokrasi, efektifitas diplomasi.

Seiring dengan prioritas nasional dalam RKP 2020, maka prioritas Tema Rancangan awal RKPD Tahun 2020, yaitu "PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA JAWA TIMUR UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING", dengan prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2020 adalah :

1. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan;
2. Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta Manajemen Kebencanaan;
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup; dan

5. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.

Berdasarkan prioritas RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sinergis mendukung pencapaian kinerja dalam *Prioritas Nasional Kesatu* yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar dengan program prioritas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan. Sinkronisasi dengan Prioritas Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur mensupport kinerja sosial pada prioritas ke 1 yaitu Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan dengan Program Prioritas Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dengan kegiatan prioritas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan. Adapun Program Prioritas Perangkat Daerah yang mensupport pencapaian prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Nasional adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan, Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Program Peningkatan Kerjasama Desa.

Mengacu pada Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur dalam RKP dan RKPD Tahun 2020, maka Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah :

1. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat;
2. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga adat dan pendamping masyarakat;
3. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
4. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan organisasi yaitu : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, dengan Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah pembangunan Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan;
2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.

Keterkaitan Tujuan dan sasaran strategis Selengkapnya sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN				
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Persentase peningkatan Lembaga Ekonomi desa/kelurahan yang berdaya	7 %	7 %	6 %	6 %	6 %
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	16,5 %	18,97 %	21,82 %	25,09 %	28,86 %
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa	8 %	10 %	11 %	18 %	20 %
			Persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan	15 %	17,5 %	20 %	22,5 %	25 %

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020, disusun dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan prioritas nasional terkait dengan penurunan persentase penduduk miskin, dengan target penurunan pada tahun 2020 RPJMD 2019 - 2024 adalah pada angka 10,20 %. Adapun program dan kegiatan prioritas dan pendukung yang pada tahun 2020 yang difokuskan pada masyarakat desa tertinggal di Jawa Timur adalah sebagai berikut :

(1) Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
- b. Pengelolaan Administrasi Keuangan
- c. Ketatausahaan dan Kepegawaian

(2) Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal;
- b. Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa;
- c. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan.

(3) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dengan kegiatan dilaksanakan meliputi :

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pemberdayaan lembaga adat;
- d. Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

(4) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, adapun kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- b. Pembinaan Administrasi dan aset desa;
- c. Pembinaan perencanaan pembangunan desa;
- d. Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(5) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pemberdayaan sumber daya kawasan perdesaan;
- b. Pendayagunaan sarana prasarana perdesaan;
- c. Inovasi dan Pendayagunaan TTG.

Dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan di Jawa Timur, program/kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya untuk mengurangi jumlah dan prosentase penduduk miskin saja, dengan mengupayakan RTM mover menjadi tidak miskin, tetapi juga harus dapat menjaga agar penduduk yang rentan miskin tidak jatuh kedalam kemiskinan. Untuk meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program/kegiatannya diarahkan pada mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas usaha ekonomi kelompok masyarakat miskin, memperkuat kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sebagai salah satu pilar mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat, memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan pembangunan desa sehingga dapat menjalankan pengelolaan manajemen pembangunan yang profesional, sehingga pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan dapat berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akuntabel. Selengkapnya rumusan

rencana program dan kegiatan PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 3.3. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13.0100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				50.037.122.000	APBD Prov. Jatim			50.784.414.700
1.13.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program yang tercapai		85%	14.101.442.408	APBD Prov. Jatim		85%	14.473.857.366
		Persentase realisasi anggaran		92%		APBD Prov. Jatim	Subsidi	92%	
		Indeks profesionalitas ASN		88%		APBD Prov. Jatim		88%	
1.13.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jawa Timur	10	1.974.024.152	APBD Prov. Jatim	Subsidi	10 dokumen	2.040.339.491
1.13.01.002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Jawa Timur	28	2.607.223.401	APBD Prov. Jatim	Subsidi	28 laporan	2.628.991.019
1.13.01.003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Jawa Timur	4	9.520.194.855	APBD Prov. Jatim		4 dokumen	9.804.526.856

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.13.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Desa/kelurahan yang berkembang dan maju		8%	19.015.554.183	APBD Prov. Jatim	Subsidi	9%	19.211.984.858
1.13.15.001	Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal/sangat tertinggal yang terfasilitasi peningkatan status IDM		30 desa	2.026.612.101	APBD Prov. Jatim	Subsidi	30 desa	2.047.547.004
1.13.15.002	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan yang naik status	Jawa Timur	30 BUMDesa	1.898.090.082	APBD Prov. Jatim	Subsidi	30 BUMDesa	1.917.697.353
		Jumlah pasar desa yang difasilitasi		30 pasar				30 pasar	
1.13.15.003	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan UEM	Jawa Timur	30 desa	1.702.652.000	APBD Prov. Jatim	Subsidi	30 desa	1.720.240.395
1.13.15.004	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berdaya di perdesaan	Jawa Timur	1.900 RTM	13.388.200.000	APBD Prov. Jatim	Subsidi	1.950 RTM	13.526.500.106
1.13.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif		31,62%	7.049.277.444	APBD Prov. Jatim	Subsidi	36,36%	7.125.758.653

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.13.16.001	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah LPMD/K, Posyandu, PKK, Karang Taruna yang difasilitasi	Jawa Timur	10.753 lembaga	2.465.840.332	APBD Prov. Jatim	Subsidi	12.365 lembaga	2.491.312.462
1.13.16.002	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Jawa Timur	2.539 pengurus	2.541.767.796	APBD Prov. Jatim	Subsidi	2.920 pengurus	2.571.705.869
1.13.16.003	Pemberdayaan lembaga adat	Jumlah lembaga adat yang terbentuk	Jawa Timur	20 lembaga adat	1.020.978.000	APBD Prov. Jatim	Subsidi	25 lembaga	1.031.524.703
1.13.16.005	Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah KPM yang difasilitasi	Jawa Timur	80 KPM	1.020.691.316	APBD Prov. Jatim	Subsidi	200 KPM	1.031.215.619
1.13.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur		12%	6.166.257.193	APBD Prov. Jatim	Subsidi	14%	6.229.954.629
1.13.17.001	Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yg diberikan pembinaan	Jawa Timur	210 aparatur	1.368.969.000	APBD Prov. Jatim	Subsidi	300 aparatur	1.383.110.450
1.13.17.002	Pembinaan Administrasi dan aset desa	Jumlah desa yang tertib pengelolaan administrasi dan aset desa	Jawa Timur	60 desa	2.023.623.117	APBD Prov. Jatim	Subsidi	60 desa	2.044.527.143
1.13.17.003	Pembinaan Perencanaan pembangunan desa	Jumlah desa yang telah melakukan update pendataan	Jawa Timur	8.010 desa	2.236.093.076	APBD Prov. Jatim	Subsidi	8.070 desa	2.259.191.917

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan evaluasi perkembangan desa/kelurahan		23 desa/kelurahan				25 desa/kelurahan	
1.13.17.008	Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dana desa	Jawa Timur	7.721 desa	537.572.000	APBD Prov. Jatim	Subsidi	7.721	543.125.119
1.13.18	Program Peningkatan kerjasama desa	Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim		18,95%	3.704.590.772	APBD Prov. Jatim	Subsidi	19,47%	3.742.859.194
1.13.18.001	Pemberdayaan sumber daya kawasan perdesaan	Jumlah desa yang dikerjasamakan	Jawa Timur	6 desa	1.291.161.279	APBD Prov. Jatim	Subsidi	7 desa	1.304.498.975
		Jumlah kawasan perdesaan		6 kawasan				7 kawasan	
1.13.18.002	Pendayagunaan sarana prasarana perdesaan	Jumlah lembaga pengelola sarana prasarana yang difasilitasi	Jawa Timur	20 lembaga	1.212.928.405	APBD Prov. Jatim		20 lembaga	1.225.457.955
1.13.18.003	Inovasi dan pendayagunaan TTG	Jumlah inovasi TTG yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa	Jawa Timur	10 TTG	1.200.501.088	APBD Prov. Jatim	Subsidi	10 TTG	1.212.902.264

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung pencapaian program pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Prioritas 1 yaitu yaitu Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan dengan Program Prioritas Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan. Adapun Program Prioritas Perangkat Daerah yang mensupport pencapaian prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Nasional ke 1 adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa/kel, Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, Program Prioritas Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dan Program Peningkatan Kerjasama Desa.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung prioritas provinsi

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung pencapaian program pemerintah provinsi Jawa Timur pada Prioritas 1 yaitu Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan dengan Program Prioritas Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dengan kegiatan prioritas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal, dan Percepatan penanggulangan kemiskinan diperdesaan.

Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Provinsi

Prioritas Provinsi : Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	KODE PROGRAM NOMENKLATUR	PROGRAM NOMENKLATUR	KODE KEGIATAN NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	OPD	Ket	
1.	Pengurangan Kemiskinan	1.	JATIM SATYA	1.13.15	Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan	1.13.15.001 1.13.15.004	1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan diperdesaan	Jumlah desa tertinggal/sangat tertinggal yang terfasilitasi peningkatan status IDM Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berdaya di perdesaan	30 Desa 1.900 RTM	Jawa Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

4.2. Prioritas Perangkat Daerah

Program dan kegiatan prioritas perangkat daerah yang pada tahun 2020 yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Prioritas Perangkat Daerah

NO	PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	KODE PROGRAM NOMENKLATUR	PROGRAM NOMENKLATUR	KODE KEGIATAN NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	OPD	Ket
1.	Restorasi Desa	1.0.13.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan	113.13.15.003	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan UEM	30 desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		1.0.13.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.	1.0.13.16.001	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah LPMD/K, Posyandu, PKK, Karang Taruna yang difasilitasi	10.753 lembaga		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				1.0.13.16.005	Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah KPM yang difasilitasi	80 KPM		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		1.0.13.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	1.0.13.17.001	Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yg diberikan pembinaan	210 aparatur		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				1.0.13.17.002	Pembinaan Administrasi dan aset desa	Jumlah desa yang tertib pengelolaan administrasi dan aset desa	60 desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				1.0.13.17.003	Pembinaan Perencanaan pembangunan desa	Jumlah desa yang telah melakukan update pendataan, Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	8.010 desa, 23 desa/kelurahan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				1.0.13.17.008	Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dana desa	7.721 desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		1.0.13.18	Program Peningkatan kerjasama desa	1.0.13.18.001	Pemberdayaan sumber daya kawasan perdesaan	Jumlah desa yang dikerjasamakan, Jumlah kawasan perdesaan	6 desa, 6 kawasan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				1.0.13.18.002	Pendayagunaan sarana prasarana perdesaan	Jumlah lembaga pengelola sarana prasarana yang difasilitasi	20 lembaga		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				1.0.13.18.003	Inovasi dan pendayagunaan TTG perdesaan	Jumlah inovasi TTG yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa	10 TTG		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020, disusun dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan prioritas nasional terkait dengan penurunan persentase penduduk miskin, dengan target penurunan pada tahun 2024 RPJMD 2019 - 2024 adalah pada angka 8,44 %. Adapun program dan kegiatan prioritas dan pendukung pada tahun 2020 yang difokuskan pada masyarakat desa tertinggal di Jawa Timur adalah sebagai berikut :

(1) Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- c. Ketatausahaan dan Kepegawaian.

(2) Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal;
- b. Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa;
- c. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan.

(3) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pemberdayaan lembaga adat;
- d. Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

(4) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, adapun kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. Pembinaan kapasitas aparaturn pemerintahan desa;
- b. Pembinaan Administrasi dan aset desa;
- c. Pembinaan perencanaan pembangunan desa;
- d. Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(5) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pemberdayaan sumber daya kawasan perdesaan;
- b. Pendayagunaan sarana prasarana perdesaan;
- c. Inovasi dan Pendayagunaan TTG.

Selengkapnya rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1.13.0100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				50.037.122.000	APBD Prov. Jatim		<i>Dinas PMD</i>
1.13.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program yang tercapai		85%	14.101.442.408	APBD Prov. Jatim		Sekretariat Dinas PMD Prov. Jatim
		Persentase realisasi anggaran		92%		APBD Prov. Jatim	Subsidi	
		Indeks profesionalitas ASN		88		APBD Prov. Jatim		
1.13.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jawa Timur	10	1.974.024.152	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
1.13.01.002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Jawa Timur	28	2.607.223.401	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
1.13.01.003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Jawa Timur	4	9.520.194.855	APBD Prov. Jatim		
1.13.15	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Desa/kelurahan yang berkembang dan maju		8%	19.015.554.183	APBD Prov. Jatim	Subsidi	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa
1.13.15.001	Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal/sangat tertinggal yang terfasilitasi peningkatan status IDM		30 desa	2.026.612.101	APBD Prov. Jatim	Subsidi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1.13.15.002	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan yang naik status	Jawa Timur	30 BUMDesa	1.898.090.082	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
		Jumlah pasar desa yang difasilitasi		30 pasar				
1.13.15.003	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan UEM	Jawa Timur	30 desa	1.702.652.000	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
1.13.15.004	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berdaya di perdesaan	Jawa Timur	1.900 RTM	13.388.200.000	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
1.13.16	Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif		31,62%	7.049.277.444	APBD Prov. Jatim	Subsidi	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
1.13.16.001	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah LPMD/K, Posyandu, PKK, Karang Taruna yang difasilitasi	Jawa Timur	10.753 lembaga	2.465.840.332	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
1.13.16.002	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Jawa Timur	2.539 pengurus	2.541.767.796	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
1.13.16.003	Pemberdayaan lembaga adat	Jumlah lembaga adat yang terbentuk	Jawa Timur	20 lembaga adat	1.020.978.000	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
1.13.16.005	Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah KPM yang difasilitasi	Jawa Timur	80 KPM	1.020.691.316	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
1.13.17	Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur		12%	6.166.257.193	APBD Prov. Jatim	Subsidi	Bidang Bina Pemerintahan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1.13.17.001	Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yg diberikan pembinaan	Jawa Timur	210 aparatur	1.368.969.000	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
1.13.17.002	Pembinaan Administrasi dan aset desa	Jumlah desa yang tertib pengelolaan administrasi dan aset desa	Jawa Timur	60 desa	2.023.623.117	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
1.13.17.003	Pembinaan Perencanaan pembangunan desa	Jumlah desa yang telah melakukan update pendataan	Jawa Timur	8.010 desa	2.236.093.076	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan evaluasi perkembangan desa/kelurahan		23 desa/kelurahan				
1.13.17.008	Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dana desa	Jawa Timur	7.721 desa	537.572.000	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
1.13.18	Program Peningkatan kerjasama desa	Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim		18,95%	3.704.590.772	APBD Prov. Jatim	Subsidi	Bidang Kerjasama Desa
1.13.18.001	Pemberdayaan sumber daya kawasan perdesaan	Jumlah desa yang dikerjasamakan	Jawa Timur	6 desa	1.291.161.279	APBD Prov. Jatim	Subsidi	
		Jumlah kawasan perdesaan		6 kawasan				
1.13.18.002	Pendayagunaan sarana prasarana perdesaan	Jumlah lembaga pengelola sarana prasarana yang difasilitasi	Jawa Timur	20 lembaga	1.212.928.405	APBD Prov. Jatim		
1.13.18.003	Inovasi dan pendayagunaan TTG	Jumlah inovasi TTG yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa	Jawa Timur	10 TTG	1.200.501.088	APBD Prov. Jatim	Subsidi	

BAB V

PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Keberdayaan masyarakat dan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Salah satu upaya memberdayakan masyarakat dan desa di Jawa Timur dilaksanakan melalui program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang secara teknis dituangkan dalam rencana kerja perangkat daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan – persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance*.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 yang terukur berfungsi pula sebagai sarana peningkatan *kinerja* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Surabaya, 2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690916 199710 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. A. Yani No. 152 C Telp. (031) 8292591 Fax (031) 8292591
SURABAYA - 60233

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 187 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen rencana kerja program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur perlu untuk menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 sebagai penjabaran tahunan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 2019 Nomor 186 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, diatas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur mempunyai lingkup tugas sebagai berikut :
1. Melakukan kompulasi rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan rencana kerja program/kegiatan dengan Bidang-bidang;

3. Menyusun rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
4. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Membebaskan kegiatan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor : 903/277/203.2/2018 Tanggal tanggal 28 Desember 2018 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kode Kegiatan (xxx08001).

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 20 Maret 2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR

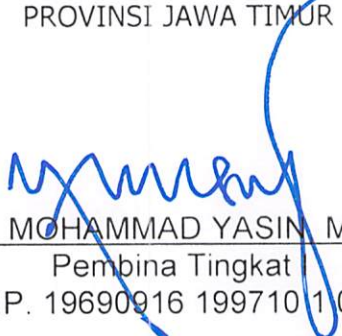

Ir. MOHAMMAD YASIN M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690916 199710 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 187 TAHUN 2019
TANGGAL : 20 MARET 2019

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si	Ketua	Kepala Dinas PMD Provinsi Jatim
2	Drs. ACHMAD ROBIUL FUAD, M.M	Sekretaris	Sekretaris Bapemas Prov Jatim
3	PANDU DANUWARA, SP	Anggota	Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran
4	SUGENG HARIYADI, SE	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
5	GUSTI PUTU MAYUN, SH	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
6	M. ANAS, SH	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
7	SUROTO, SH	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
8	DEDY AGUS IRWANTO	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
9	DONNY MARCIANO, S. Kom	Anggota	PTT Dinas PMD Prov. Jatim
10	Pembina Penyusunan RENJA DPMD Prov. Jatim	Narasumber	BAPPEDA PROV. JATIM

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR


Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si
Pembina Tingkat
NIP. 19690916 199710 1001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
Di Surabaya (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di
Sidoarjo;
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Prov. Jatim di
Surabaya;
4. Sdr. Kepala BPKAD Prov. Jatim di Surabaya.